

Jurnal Logos Spectrum

ISSN 1907-316X

volume 9, No 1, Januari - Maret 2014

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik.
W. Y. Rompas

Faktor Sosial, Ekonomi Dan Budaya Yang Mempengaruhi Usaha Peningkatan
Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Borgo Kecamatan Tombariri
Selvie M. Tumengkol

Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Lisbeth Lesawengen

Pengaruh Budaya Birokrasi Terhadap Kinerja Aparatur Di Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
A.J. Roorong

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sitaro
Wehelmina Rumawas

Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Pada Industri Mebel
Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Leilem Kecamatan Sonder.
Nelly Elsje Waani

Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jamkesmas
Di Kabupaten Halmahera Utara
Ogotan Martha

Peranan Kepemimpinan Dalam Pengawasan Lingkungan Hidup
Juliana Lumintang

Pentingnya Perencanaan Sosial Dalam Penyusunan Program Pembangunan
Selfie Wowor

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Polisi Di Wilayah
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Enggar Broto Seno,



UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI

Jurnal				Manado	ISSN
	Vol 9	No 1	Hal 1 - 81		
Logos Spetrum				Januari – Maret 2014	1907-316X

JURNAL LOGOS SPECTRUM

Volume 9, No 1, Januari – Maret 2014

KOMPOSISI PERSONALIA JURNAL LOGOS SPECTRUM

Pelindung

Dekan Fisip Unsrat
Philep M. Regar

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Sosiologi
Nicolaas Kandowanko

Pemimpin Umum/Redaksi

Anthonius Purwanto

Redaktur Pelaksana

Hendrik W. Pongoh

Dewan Redaksi

Benedicta J. Moku
Hendrik W. Pongoh
I Nengah Punia
Fonny J. Waani
Eveline J.R. Kawung
Shirley Y.V.I. Goni

Mitra Bebestari

Basri Amin
(Univ. Gorontalo)
Yustinus Slamet Antono
(STFT. St. Yohanes. Pematang Siantar)

Editor Eksekutif

John Dewey Zakarias

Administrasi Keuangan

Evie A.A. Suwu

**Diterbitkan Oleh : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat
Manado, bekerja sama dengan penerbit Media Pustaka Manado**

JURNAL LOGOS SPECTRUM
VOLUME 9 NO 1 JANUARI - MARET 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas petunjuk dan kasihnya sehingga kita senantiasa berkarya membangun peradaban bangsa, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk penerbitan *Jurnal Ilmiah Logos Spectrum* Volume 9 Nomor 1. Januari – Maret 2014

Pada volume kali ini, dimuat sepuluh artikel yang berupa hasil penelitian maupun kajian ilmiah dari beberapa penulis dengan latar belakang Akademik dan birokrat ataupun para menejer perusahaan dari wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku dan Papua.

Jurnal *Logos Spectrum* merupakan media informasi dalam rangka menyebarluaskan berbagai karya ilmiah, baik berupa hasil penelitian maupun tulisan ilmiah populer yang ditulis oleh para penulis yang mempunyai latar belakang bidang ilmu sosial yang berminat mempublikasikan karya-karyanya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga tulisan-tulisan yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Selamat Membaca

Redaksi

JURNAL LOGOS SPECTRUM

VOLUME 9, NO 1, JANUARI - MARET 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -- ii

DAFTAR ISI -- i

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik. 1 - 9
W. Y. Rompas

Faktor Sosial, Ekonomi Dan Budaya Yang Mempengaruhi Usaha Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Borgo Kecamatan Tombariri 10 - 14
Selvie M. Tumengkol

Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa 15 - 21
Lisbeth Lesawengen

Pengaruh Budaya Birokrasi Terhadap Kinerja Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 22 - 27
A.J. Roorong

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sitiro 28 - 33
Wehelmina Rumawas

Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Pada Industri Mebel Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Leilem Kecamatan Sonder. 34 - 40
Nelly Elsje Waani

Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jamkesmas Di Kabupaten Halmahera Utara. 41 - 46
Ogotan Martha

Peranan Kepemimpinan Dalam Pengawasan Lingkungan Hidup 47 - 56
Juliana Lumintang

Pentingnya Perencanaan Sosial Dalam Penyusunan Program Pembangunan 57- 64
Selfie Wowor

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Polisi Di Wilayah Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 65 - 81
Enggar Broto Seno

Jurnal				Manado	ISSN
	Vol 9	No 1	Hal 1 - 81		
Logos Spetrum				Januari – Maret 2014	1907-316X

Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jamkesmas
Di Kabupaten Halmahera Utara

Ogotan Martha

Dosen Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fispol Unsrat Manado

Abstract

ABSTRACT efforts to improve the implementation of the program has been carried out by the government JAMKESMAS, but still there are problems or irregularities implementation of health services to participants in both health card and Hospital Health Center. This was caused partly by a lack of oversight of the implementation of the program at the hospital or health center .. based on this conceptual background, this study was conducted to determine the extent to which the role of the health department in the monitoring program in North Halmahera JAMKESMAS.

The method used in this study is a qualitative method. The focus of this research is the head of health supervision in the implementation of a health card services in hospitals and health centers. Source of data / key informants in the study were taken from various elements associated with the implementation of the existing health card program in the health department, hospitals, health centers, and PT.ASKES; than that taken from the participants JAMKESMAS informants to determine service delivery in health centers and hospitals. The total number of data sources / informants, there were 14 people. The main instrument of this study is the researchers themselves, while the technique of data collection was interviews. The analysis technique used is the qualitative analysis of interactive models and Hubermann Miler.

The result lead to the conclusion that in general health services in the District of North Halmahera in katakana yet effective due to the current resource (Doctor), respectively in hospitals and even health centers is still low: conclusions based on research indicators, namely: (1) The role of the head of health in direct supervision method jamkesmas program can be conducted in accordance with both the position and authority as a responsible team manager and secretary jamkesmas jamkesmas district coordination team, (2) the role of head of the health card program oversight through monitoring method does not lanagsung (coordination and reporting system) in hospitals and health centers of North Halmahera regency has been implemented effectively.

Departing from the result of this penellian then suggested: (1) the role of the health card program oversight through direct supervision method needs to be done by the head of North Halmahera district health offices. (2) the role of head of department in the supervision of a health card program through the method of indirect supervision (coordination and reporting system) needs to be improved.

Keywords: monitoring, health card program, health services.

PENDAHULUAN

Peran pemimpin dalam pengawasan di dalam suatu organisasi sangat penting demi tercapainya suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya dimana pengawasan itu ialah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan/manager untuk mengetahui apakah pelaksanaan hasil kerja telah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi ada penyimpangan-penyimpangan akan segera ditanggulangi. Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui dan menunjuk pada kelemahan-kelemahan

yang ada, agar dapat diperbaiki bahkan dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan Jamkesmas, maka pemerintah kabupaten Halmahera Utara terutama kepala dinas kesehatan terus melakukan upaya perbaikan. Dalam rangka pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang di pertegas oleh (Stoner dan Wankel, 1996) bahwa pengawasan (controlling) merupakan proses melalui mana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Lanjut dikatakan,

Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jamkesmas, Di Kabupaten Halmahera Utara

proses pengawasan mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya mengambil tindakan perbaikan. Menurut Terry (1994) bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang terbentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu : (1) mengukur hasil dari pekerjaan, dengan cara observasi secara pribadi, dari laporan-laporan tertulis, dan juga laporan-laporan lisan; (2) membandingkan hasil dari pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan apabila ada terjadi perbedaan, dan (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Dengan kata lain menurut Terry (1994) bahwa pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan : (1) mencari informasi/keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan, (2) membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan, dan (3) menyetujui hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan tindakan-tindakan perbaikan.

Walaupun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Terutama Kepala Dinas Kesehatan, akan tetapi masalah pelayanan kesehatan masih saja nampak bahkan untuk meningkatkan pelayanan Jamkesmas, masih dapat ditemukan fakta yang menunjukkan implementasi program ini di lapangan atau pada tingkat operasional masih terdapat adanya kelemahan dan penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. ini antara lain dapat dilihat dari masih adanya keluhan dari masyarakat peserta Jamkesmas tentang pelayanan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah penyelenggara program Jamkesmas. Pasien (Masyarakat) pemegang kartu kepesertaan Jamkesmas masih sering dipersulit untuk memperoleh pelayanan ataupun seringkali mendapatkan pelayanan yang tidak/kurang maksimal, seperti ditolak untuk pengobatan rawat inap dengan alasan tidak ada tempat, masih dibebankan biaya-biaya tertentu yang tidak jelas, membayar obat-obatan. Prosedur pelayanan juga dirasakan masih rumit dan

berbelit-belit, persyaratan teknis administratif yang masih cukup memberatkan masyarakat. Petugas Rumah Sakit atau Puskesmas juga seringkali bersikap kurang baik/sopan dalam memberikan pelayanan seperti seolah-olah tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu tentang program Jamkesmas ini, sehingga pelayanan terhadap para peserta/pengguna Jamkesmas diperlakukan tidak sebagaimana pasien lainnya yang bukan masyarakat miskin, maka dengan itu bagaimana melihat pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan untuk bisa terlepas dari keluhan masyarakat di kabupaten halmahera Utara. Oleh karena berbagai kelemahan ataupun penyimpangan dalam implementasi program Jamkesmas tersebut dapat pula disebabkan antara lain oleh kurangnya atau lemahnya pengawasan dari instansi atau pejabat terkait yang berwenang.

Dengan bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang "peran Kepala Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Program Jamkesmas Di Kabupaten Halmahera Utara".

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Bungin (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Miskin Kabupaten Halmahera Utara. Fokus penelitian ini didefinisikan sebagai aktivitas dari pemimpin untuk melakukan pengamatan dan juga pengukuran terhadap hasil dari pelaksanaan tugas pekerjaan agar benar-benar sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya dengan melihat dari beberapa indikator permasalahan dalam penelitian ini,

yaitu : pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

Jenis data penelitian yang di gunakan untuk dianalisis yaitu jenis data primer. Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode/teknik wawancara, pengamatan, pengumpulan data sekunder. Cara analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini melihat Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jamkesmas Di Kabupaten Halmahera Utara oleh sebab itu untuk menjawab permasalahan penelitian, maka telah dilakukan pengumpulan data dengan melakukan teknik-teknik wawancara dan observasi lapangan.

Hasil wawancara dengan para informan baik dengan pejabat terkait dengan program jamkesmas maupun dengan masyarakat peserta jamkesmas di atas dapat dibuatkan rangkuman sesuai dengan indikator-indikator atau aspek-aspek untuk melihat atau menilai peran dari kepala dinas dalam pelaksanaan program jamkesmas di kabupaten Halmahera Utara dengan menganalisis hasil tersebut maka kepala dinas menerapkan metode pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung.

Peranan kepala dinas kesehatan dalam pengawasan program jamkesmas belum banyak dilakukan dengan cara pengawasan langsung seperti inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan di tempat. Semua informan pejabat terkait yang diwawancarai mengatakan bahwa kepala dinas kesehatan sangat jarang melakukan inspeksi langsung ataupun observasi langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada para peserta jamkesmas di fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah-rumah sakit), tetapi lebih banyak ditugaskan kepada kepala bidang pelayanan dan kepala bidang jaminan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten. Para informan pejabat terkait yang diwawancarai mengemukakan, kepala dinas kesehatan sangat jarang dating

melakukan pengecekan langsung kebenaran laporan pelaksanaan pelayanan jamkesmas yang disampaikan oleh petugas puskesmas atau rumah sakit atau oleh bawahan yang terkait, tetapi biasanya dilakukan pada rapat koordinasi para tim pengelola jamkesmas kabupaten. Semua informan pejabat terkait yang diwawancarai juga mengemukakan, kepala dinas kesehatan jarang/tidak pernah melakukan dialog langsung dengan warga masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan jamkesmas di puskesmas dan rumah sakit, tetapi melalui laporan bawahan yang terkait; Semua informan masyarakat peserta jamkesmas yang diwawancarai juga mengemukakan tidak pernah melihat atau mendengar kepala dinas melakukan dialog dengan para peserta atau keluarga peserta jamkesmas tentang pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

Pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesmas pada semua fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) apakah sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Semua informan pejabat/petugas terkait yang diwawancarai mengatakan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada semua peserta jamkesmas sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada (Puskesmas dan RSUD) sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis program jamkesmas yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan. Menurut informan masyarakat peserta jamkesmas yang diwawancarai bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas lancar, tidak mempersulit, tidak dipungut biaya, dan memuaskan; pelayanan di RSUD menurut semua informan tersebut juga sudah baik dan lancar, namun demikian masih ada persyaratan administrasi dan juga prosedur pelayanannya masih dirasakan lebih berat dan lebih rumit jika dibandingkan dengan pelayanan di puskesmas.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, serta prinsip yang dianut (Fayol, 1949). Pengawasan juga dimaksudkan untuk

Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jamkesmas Di Kabupaten Halmahera Utara

mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari terjadi dikemudian hari.

Pengawasan secara langsung adalah dilakukan dengan cara mendatangi untuk melakukan pemeriksaan ditempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Dengan pengawasan ini maka yang mengawasi dapat melihat dan menghayati sendiri bagaimana bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk atau instruksi yang secara langsung menyangkut masalah yang bisa mempengaruhi jalannya pekerjaan. Pengawasan yang tidak langsung adalah memiliki pengertian pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat-tempat pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain dilakukan dari belakang meja dengan cara menganalisa dan mempelajari dokumen yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan (Siagian dalam Sujanto : 1986).

Sesuai dengan pengertian tersebut diatas, maka dari hasil pengumpulan data sesuai indikator-indikator yang meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, berikut hasil analisis dari peneliti dengan menyesuaikan dari teori yang bersangkutan dengan indikator penelitian ini, yakni:

1. Pengawasan secara langsung

Bersama pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan dan penerapan dari sistem pelaporan kegiatan program jamkesmas pada semua instansi/unit kerja terkait di Halmahera Utara, hal itu sudah sesuai dengan hasil penelitian bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan dengan baik akan peranan pengawasan preventif dan juga represif terhadap seluruh program jamkesmas. Seperti yang diketahui bahwa pengawasan preventif dimaksudkan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan bisa terhindar dari tindakan penyimpangan; sementara itu pengawasan represif dimaksudkan untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan dari program jamkesmas, maka kepala dinas kesehatan sebagai penanggung jawab pengelolaan jamkesmas di kabupaten

mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan jamkesmas terutama terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit). Senada dengan teori dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan koordinasi kepala dinas kesehatan terhadap program jamkesmas di kabupaten Halmahera Utara sudah dapat dilaksanakan dengan baik melalui penerapan pada sistem pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit). Semua puskesmas dan rumah sakit penyelenggara pelayanan jamkesmas wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada kepala dinas melalui tim pengelola kabupaten.

Selain itu melalui rapat koordinasi, kepala dinas selaku penanggung jawab dari tim pengelola jamkesmas kabupaten meminta laporan dan keterangan lisan kepada pihak puskesmas dan rumah sakit tentang pelaksanaan dan berbagai masalah atau kendala di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesmas, sekaligus mengecek kebenaran laporan tertulis yang telah disampaikan.

2. Pengawasan tidak langsung

Bahwa pengawasan tersebut dapat dilakukan lebih efektif oleh kepala dinas kesehatan terhadap pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesmas pada fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan program jamkesmas akan lebih efektif (Siagian, 2000). Yang diuraikan dalam tinjauan pustaka di atas dapat dipahami bahwa pengawasan merupakan salah satu bentuk fungsi manajemen; artinya bahwa pengawasan merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin/pimpinan dalam sebuah organisasi. Pengawasan adalah suatu aktivitas atau tindakan pihak manajemen/pimpinan mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui sudah seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta

apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan itu bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Pengawasan itu dapat bersifat preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin sebelum suatu kegiatan dilakukan dengan maksud agar supaya tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan; dan dapat pula bersifat represif yaitu dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan (Hasibuan, 1996). Fungsi dari pengawasan ini dapat dilakukan oleh para pemimpin/pimpinan melalui metode atau pengawasan langsung (inspeksi langsung, observasi ditempat, laporan ditempat), maupun secara tidak langsung seperti melalui penciptaan koordinasi pelaksanaan dan sistem pelaporan tertulis dan lisan (Siagian, 2000).

Dengan landasan teori diatas kemudian dihubungkan dengan semua hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala dinas kesehatan dalam pengawasan program jamkesmas sudah dilakukan dengan baik di kabupaten Halmahera Utara dengan metode atau teknik pengawasan tidak langsung yaitu melalui cara dari pengkoordinasian terhadap instansi/unit kerja atau unsur yang terkait, dan melalui penerapan pada sistem pelaporan pelaksanaan jamkesmas pada fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa pada umumnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara belum dikatakan efektif karena sampai sekarang ini sumberdaya yakni (Dokter) masing-masing di RSUD bahkan puskesmas masih minim.

Sesuai dengan indikator penelitian ini, peranan kepala dinas kesehatan dalam pengawasan program jamkesmas baik pengawasan secara langsung maupun

tidak langsung di kabupaten Halmahera Utara yang sebagaimana dilihat dari kedua aspek tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: pengawasan secara langsung atas peran kepala dinas kesehatan sudah sesuai kedudukan dan kewenangannya selaku penanggung jawab dari tim pengelola jamkesmas dan sekretaris tim koordinasi terhadap pengawasan yang dilakukan (seperti : Inspeksi langsung, observasi dan laporan program jamkesmas) di Rumah sakit maupun di Puskesmas yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sudah dilaksanakan dengan cara efektif. Pengawasan secara tidak langsung yang bagaimana peranan Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan program jamkesmas pada semua instansi/unsur terkait dan melalui penerapan sistem pelaporan tertulis pelaksanaan program jamkesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) di Kabupaten Halmahera Utara sudah dilaksanakan dengan efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan saran secara umum kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara agar senantiasa lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Adapun di rekomendasikan saran kepada pihak terkait dengan program Jamkesmas di Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan indikator-indikator pengawasan secara langsung ataupun pengawasan tidak langsung, yaitu : Peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan secara langsung terhadap program jamkesmas harus lebih di tingkatkan dan lebih dioptimalkan, maka perlu pengawasan secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara.

Peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan tidak langsung yaitu dengan mengkoordinasikan pelaksanaan pada semua instansi/unsur terkait dan melalui penerapan sistem pelaporan

Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jamkesmas
Di Kabupaten Halmahera Utara

tertulis pelaksanaan program jamkesmas oleh fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) di Halmahera Utara perlu ditingkatkan agar lebih dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin. B. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Hasibuan. M. 1996, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.

Moleong. L. J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Siagian. S. P. 2000, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
Sujanto, 1986, *beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Stoner. L. J. Dan C. Wankel, 1996, *Manajemen* (terjemahan), Jakarta, Intermedia.
Terry. G. R. 1994, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung, Alumi.